

Tata Kelola Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Lutfiatul Laili Arrohmati¹, Oktarizka Reviandani²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

21041010070@student.upnjatim.ac.id¹, oktarizka.r@adneg.upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

Labor-intensive programs are one of the strategies employed by the Surabaya city government to alleviate poverty in Surabaya. Labor-intensive programs are initiatives that aim to empower poor communities by utilizing natural resources, labor, and local technology. The main objective of these labor-intensive programs is to increase income and provide employment opportunities for poor communities. This study aims to analyze and describe in depth the collaborative governance in the implementation of the labor-intensive program in Semampir District, Surabaya City, using Ansell and Gash's (2008) theory, which includes four variables: (1) initial conditions; (2) institutional design; (3) facilitative leadership; and (4) collaborative process. This study employs a qualitative descriptive research method with informant selection using purposive sampling. The results indicate that: (1) The initial conditions of the program exhibit an imbalance of power, resources, and knowledge, making it difficult for the community to access information. (2) Institutional design, which includes active stakeholder participation, limited forums, and basic rules, has been implemented effectively. (3) Facilitative leadership, carried out by the Mayor of Surabaya and the Regional Development Planning Agency (Bappedalitbang), involves planning and organizing community-based work programs. (4) The collaborative process conducted by each stakeholder is sufficiently effective. Although collaborative governance in the implementation of labor-intensive programs in Semampir subdistrict faces a number of challenges, collaboration between various actors can accelerate the achievement of program objectives.

Keywords : Poverty, Coordination, Labor-intensive, Collaborative Governance.

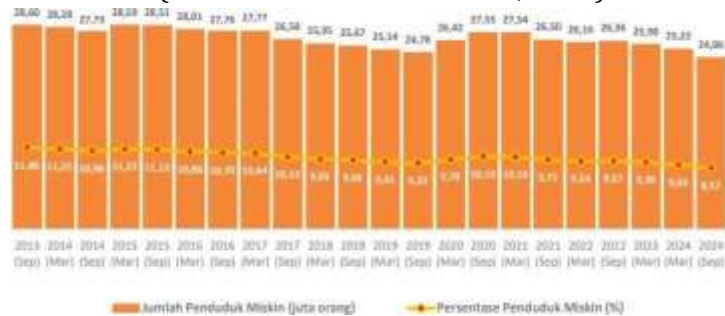
ABSTRAK

Padat karya merupakan salah satu strategi pemerintah kota Surabaya dalam mengentaskan kemiskinan di Surabaya. Padat Karya adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Tujuan utama dari program padat karya ini adalah meningkatkan pendapatan serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam Tata kelola kolaboratif dalam Pelaksanaan Program Padat Karya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya menggunakan teori Ansell dan Gash(2008) yang mencakup 4 (empat) variabel yakni: (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan fasilitatif; dan (4) proses kolaboratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kondisi Awal program terdapat ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya dan pengetahuan sehingga masyarakat susah mengakses informasi. (2) Desain Kelembagaan berupa partisipasi aktif *stakeholders*, forum terbatas dan aturan dasar sudah terlaksana dengan baik. (3) Kepemimpinan Fasilitatif yang dilakukan oleh Walikota Surabaya dan Bappedalitbang yang melakukan perencanaan serta mengatur kegiatan Padat Karya. (4) Proses kolaboratif yang dilakukan oleh masing-masing stakeholders sudah cukup baik. Meskipun tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan program padat karya di kecamatan semampir menghadapi sejumlah tantangan, kolaborasi antara berbagai aktor dapat mempercepat pencapaian tujuan program.

Kata kunci: Kemiskinan, Koordinasi, Padat Karya, Tata Kelola Kolaboratif.

PENDAHULUAN

Kemiskinan telah menjadi masalah penting bagi manusia di seluruh dunia (Sholihin, 2021). Negara maju maupun negara berkembang juga menghadapi masalah kemiskinan, tetapi tingkat kemiskinan penduduk di negara berkembang lebih tinggi daripada di negara maju (Hakim & Syaputra, 2020). Indonesia termasuk dalam daftar 100 negara termiskin di dunia. Berdasarkan pengukuran pendapatan nasional bruto per kapita atau yang dikenal dengan sebutan Gross National Income (GNI). Menurut World Population Review, Indonesia berada di peringkat ke 73 sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia (CNN INDONESIA, 2022). Badan Pusat Statistik Indonesia mengartikan kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan agar dapat hidup dengan layak baik dari segi kebutuhan pangan maupun non-pangan. Beragam definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat menjelaskan bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia diartikan sebagai suatu keadaan seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman, sandang, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. World Bank (2012) dalam (Dakhilullah, 2023) mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah minimnya pendapatan dan aset, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Berdasarkan data dari Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir (Andi Audia Faiza Nazli Irfan, 2024).



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2025
Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2013- September 2024

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa statistik kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang periode September 2013 hingga September 2024 terlihat dengan adanya kenaikan dan penurunan pada tahun tertentu. Di sisi lain, sebagai pulau terbesar dengan luas 128.297 km² yang saat ini dihuni oleh 151,6 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 1.121 jiwa/km². Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkembang di Indonesia dan menyumbang sebagian besar aktivitas industri dan perdagangan, maka distribusi penduduk miskin paling banyak berada di pulau Jawa

(Kompasiana.com, 2024). Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa yang lebih tinggi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kesenjangan pendapatan, akses yang terbatas terhadap sumber daya, dan ketidakmerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Namun, pada tahun 2024 kemiskinan di provinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberian bantuan dan pembukaan kesempatan kerja. Salah satu program pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya (Mulyadi, 2018). Program padat karya merupakan program yang berfokus pada tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin (Widyastuti et al., 2021). Padat Karya adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga daya beli masyarakat (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2021). Program yang dikelola oleh pemerintah melalui Bappenas bertujuan memberikan kesempatan kerja kepada keluarga miskin yang mengalami kehilangan pendapatan atau pekerjaan tetap. Program ini bertujuan untuk menyediakan kesempatan kerja, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan selama masa sulit (Widyastuti et al., 2021).

Surabaya merupakan salah satu kota yang juga ikut menggerakkan Program Padat Karya. Hal tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah kota Surabaya dalam mengentaskan kemiskinan di Surabaya. Program Padat Karya Surabaya, yang diusulkan oleh Eri Cahyadi, berkonsentrasi pada kebutuhan dan kondisi unik Kota Surabaya. Ini akan melibatkan proyek infrastruktur lokal, perbaikan lingkungan, dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Kota Surabaya (Sari & Meirinawati, 2024). Tujuan utama dari program padat karya ini adalah meningkatkan pendapatan serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi Masyarakat miskin dan pengangguran, terutama bagi mereka yang mengalami penurunan penghasilan dan kehilangan pekerjaan tetap (Lafina, et al 2023). Sasaran atau penerima manfaat dari program Padat Karya di Surabaya yaitu keluarga miskin (Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2023).

Program padat karya terdiri dari dua alur. Alur pertama meliputi penyediaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, alur kedua berfokus pada pemberdayaan dan pengelolaan usaha mikro, di mana keluarga miskin menjadi penerima manfaat dengan dukungan fasilitasi dari pemerintah (Radar Surabaya, 2024). Dikutip dari surabaya.tribunnews.com, Walikota Surabaya mengatakan bahwa bentuk pelatihan atau pekerjaan yang ditawarkan meliputi usaha cuci mobil, laundry, menjahit, rumah produksi batik, cafe, sentra wisata kuliner, dan jenis usaha lainnya (surabaya.tribunnews.com, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, total penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita Rp. 742.678 per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK di Kota Surabaya pada bulan September 2024 mencapai 136,37 ribu jiwa. Jumlah tersebut tersebar dalam 30 kecamatan di Kota Surabaya. Berikut merupakan data penduduk miskin di Kota Surabaya berdasarkan kecamatan.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Berdasarkan Kecamatan tahun 2024

No	Kecamatan	Miskin
1	SEMAMPIR	8130 Orang
2	KREMBANGAN	7064 Orang
3	TEGALSARI	5762 Orang
4	SAWAHAN	5302 Orang
5	WONOKROMO	5127 Orang
6	TAMBAKSARI	4862 Orang
7	KENJERAN	4298 Orang
8	PABEAN CANTIAN	3736 Orang
9	SIMOKERTO	3070 Orang
10	KARANG PILANG	2667 Orang
11	WONOCOLO	2646 Orang
12	SAMBIKEREP	2488 Orang
13	SUKOLILO	2409 Orang
14	JAMBANGAN	1645 Orang
15	GUBENG	1513 Orang
16	DUKUH PAKIS	1499 Orang
17	SUKOMANUNGGAL	1161 Orang
18	GENTENG	1095Orang
19	PAKAL	762Orang
20	MULYOREJO	719 Orang
21	BUBUTAN	710 Orang
22	WIYUNG	586 Orang
23	ASEM ROWO	447 Orang
24	LAKARSANTRI	393Orang
25	TENGGILIS MEJOYO	282 Orang
26	BULAK	267 Orang
27	GAYUNGAN	221 Orang
28	BENOWO	216 Orang
29	GUNUNG ANYAR	123 Orang
30	RUNGKUT	60 Orang

Sumber: Pemerintahan.surabaya.go.id

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan semampir menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kota Surabaya. Kecamatan semampir yang terdiri dari lima kelurahan yaitu, kelurahan ampel, pegirian, sidotopo, ujung, dan wonokusumo merupakan salah satu lokasi yang melaksanakan program padat karya di Surabaya. Terdapat berbagai jenis padat karya yang dilaksanakan di kecamatan semampir. Ada dua jenis padat karya di kecamatan semampir yaitu dalam bentuk pelatihan dan jenis padat karya bantuan modal. Berikut tabel jenis padat karya yang berada di Kecamatan Semampir.

Tabel 2 Jenis Program Padat Karya di Kecamatan Semampir

No	Jenis Program	Peserta atau penerima	OPD Pengampu
1.	a. Jahit Seragam Hijab Vermak (Mesin Jahit) b. Toko Kelontong (Etalase)	a. 33 orang b. 1 orang	DINKOPDAG
2.	Cuci Motor	2 orang	BPKAD
3.	Service AC	1 orang	DISPERINAKER

Sumber: Kantor Kecamatan Semampir, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jenis program padat karya yang berada di kecamatan semampir. Servis ac merupakan padat karya dalam bentuk pelatihan sedangkan jahit seragam, toko kelontong dan cuci motor merupakan padat karya bantuan modal. Program padat karya yang dilakukan di kecamatan semampir masih tetap dilaksanakan sampai sekarang, akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Sasaran padat karya adalah warga miskin yang ditentukan melalui proses seleksi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yang mulanya dilakukan melalui seleksi dari RT. Hasil seleksi tersebut dibuktikan dengan survei langsung ke rumah warga. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Pandita et al., 2024) yang berjudul Implementasi Program Padat Karya dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya Tahun 2024 menjelaskan bahwa Implementasi padat karya di kecamatan semampir masih belum maksimal dan masih terdapat tantangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan program padat karya di kecamatan semampir kota Surabaya yang dilihat melalui pendekatan kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2008) yang mencakup 4 (empat) variabel yakni: (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan fasilitatif; dan (4) proses kolaboratif.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2020) metode penelitian kualitatif adalah metode berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini dapat menggambarkan deskripsi secara mendalam mengenai tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan program padat karya di kecamatan semampir kota Surabaya. Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini yaitu melalui, wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan 10 (sepuluh) orang informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik penentuan informan dengan bahan pemikiran tertentu (Abdussamad, 2021). Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berasal dari wawancara dan observasi dan sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, website resmi, serta referensi dokumen lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari empat alur kegiatan yaitu, Pengumpulan Data (Data Collection), Kondensasi Data (*Data*

Condensation), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*) (Miles et al., 2014) dan dianalisis menggunakan pendekatan tata kelola kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2008) yang mencakup 4 (empat) variabel yakni: (1) Kondisi Awal; (2) Desain Kelembagaan; (3) Kepemimpinan Fasilitatif; dan (4) Proses Kolaboratif. Berikut diuraikan hasil penelitian pada masing-masing dimensi tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan program padat karya di kecamatan semampir kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Surabaya telah menginisiasi Program Padat Karya untuk mengurangi kemiskinan yang diatur di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 mengenai Program Padat Karya di wilayah Surabaya.. Kecamatan Semampir merupakan kecamatan yang menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kota Surabaya yang juga menjadi lokasi pelaksanaan Program padat karya. Program Padat Karya yang dilaksanakan di Kecamatan Semampir meliputi dua skema yaitu dalam bentuk pelatihan dan jenis padat karya bantuan modal. Padat karya bentuk pelatihan berfokus pada pemberian pelatihan sedangkan padat karya bantuan modal lebih berfokus pada pemberian bantuan berupa modal usaha bagi warga miskin dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan warga miskin tersebut.

Pelaksanaan Program Padat Karya di Kecamatan Semampir melibatkan berbagai aktor baik pemerintah maupun non-pemerintah. Pada penelitian ini untuk mengetahui proses kolaborasi dalam pelaksanaan program Padat Karya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya, penulis menggunakan teori pendekatan kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2008) yang mencakup 4 (empat) variabel yakni: (1) Kondisi Awal; (2) Desain Kelembagaan; (3) Kepemimpinan Fasilitatif; dan (4) Proses Kolaboratif.

Kondisi Awal

Ansell dan Gash dalam Qomariyah (2023) menyatakan bahwa kondisi awal menjadi pemicu timbulnya dorongan para pihak yang terlibat, termasuk pemerintah dan lembaga lainnya, untuk terlibat dalam kolaborasi. Dalam kondisi awal terdapat 3 (tiga) variabel yaitu ketidakseimbangan antara pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan, bentuk dorongan dan kendala dalam partisipasi kolaborasi, dan pengalaman kerjasama dan konflik masa lalu. Ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan pemangku kepentingan sering terjadi dalam tata kelola kolaboratif.

Berdasarkan hasil penelitian pada kolaborasi dalam pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Semampir terdapat kekuatan yang mendominasi sehingga masyarakat kesulitan mengakses informasi, modal, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk berperan aktif dalam program padat karya tersebut. Selain itu, regulasi sering kali dibuat oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat desa, sehingga kurang mencerminkan kepentingan mereka. Permasalahan lain yang dihadapi adalah ketidakseimbangan sumber daya yaitu masih kurangnya bantuan dari CSR ketika awal program tersebut berjalan. Kemudian bentuk dorongan dalam partisipasi kolaborasi pelaksanaan program padat karya

di Kecamatan Semampir dilakukan dalam bentuk komunikasi, sosialisasi, dan dukungan dari pimpinan. OPD pengampu melakukan sosialisasi kepada kecamatan. Lalu, kecamatan semampir akan melakukan sosialisasi program tersebut kepada keluarga miskin. Sedangkan kendala pada kondisi awal yaitu kurangnya waktu. kurangnya waktu yang dimiliki kecamatan semampir dalam melakukan survei keluarga miskin dan juga belum terdapat SOP yang jelas pada setiap jenis program padat karya. Pengalaman kerja sama dalam kolaborasi penting karena akan menciptakan saling ketergantungan dalam mencapai tujuan bersama. pada kondisi awal kolaborasi pelaksanaan program padat karya di kecamatan semampir kota Surabaya pengalaman kerja sama sudah ada yaitu bappedalitbang bersama dengan OPD pengampu bekerja sama dengan baznas pada aspek pemberian bantuan peralatan.

Desain Kelembagaan

Ansell dan Gash dalam Qomariyah (2023) menyatakan bahwa desain kelembagaan merujuk pada kerangka dasar yang mengatur kolaborasi. Desain kelembagaan memperhatikan tiga aspek yaitu inklusivitas partisipatif, forum terbatas, dan aturan dasar yang jelas dan transparansi proses. Desain kelembagaan merupakan unsur-unsur yang secara terorganisasi dalam hal ini meliputi baik dari unsur pemerintah, swasta, dan juga masyarakat umum. Partisipasi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program padat karya di kecamatan semampir kota Surabaya tercantum pada Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2023. Dalam Peraturan tersebut berisi peran dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki peran sebagai fasilitator. Setiap OPD pengampu memfasilitasi pemberian bantuan alat maupun modal usaha. Sementara itu, perusahaan swasta berperan sebagai mitra dalam hal pelatihan maupun pendukung dalam hal pendanaan dan masyarakat miskin juga berpartisipasi dalam program. Selain inklusivitas partisipatif, forum terbatas sudah dilakukan melalui pertemuan rutin.



Sumber : Bappedalitbang, Tahun 2024

Gambar 1 Forum Terbatas

Forum terbatas yang dilakukan, dihadiri oleh Bappedalitbang, kecamatan dan OPD pengampu sebelum program dilaksanakan untuk membahas mekanisme program. Selain dua hal tersebut, sudah terdapat juga aturan dasar yang jelas dalam pelaksanaan program padat karya di kecamatan semampir kota Surabaya, yaitu berlandaskan beberapa peraturan. Peraturan tersebut diantaranya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat

Karya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Program Padat Karya Di Kota Surabaya Walikota Surabaya.

Kepemimpinan Fasilitatif

Konsep kepemimpinan yang bersifat fasilitatif, atau *facilitative leadership*, merupakan pendekatan yang diberlakukan untuk memastikan bahwa kepemimpinan dan pengelolaan dalam konteks pemerintahan berlangsung secara efisien dan efektif. Ansell dan Gash menerangkan bahwa sebuah tahapan proses kolaborasi perlunya fungsi jiwa kepemimpinan yang dimiliki para aktor (Noor, Suaedi, & Mardiyanta, 2022). Ansell dan Gash (2008) juga menegaskan bahwa kepemimpinan dalam konteks *collaborative governance* harus mengemban peran sebagai seorang pemimpin fasilitatif. Kepemimpinan memiliki peran yang penting untuk membawa stakeholders bersama-sama ke dalam forum dan membuat mereka untuk terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif dengan para pemimpin untuk menghasilkan kesepakatan (Qomariyah, 2023). Chrislip & Carl E. Larson, 1994 dalam (Noor, Suaedi, & Mardiyanta, 2022) mengatakan bahwa peran kepemimpinan dalam kolaboratif adalah membantu stakeholder menemukan solusi yang bersifat win-win, pemimpin adalah fasilitator atas proses kolaboratif. Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya dilakukan oleh Bapak Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya yang menginisiasi program padat karya di Kota Surabaya juga peran Bappedalitbang yang bertanggungjawab atas perencanaan dan menjalin kerja sama dengan kecamatan dan OPD pengampu dalam pertemuan rutin. Selain Bappedalitbang, pihak kecamatan dan kelurahan berperan dalam melakukan pendataan warga miskin yang akan menjadi penerima manfaat program tersebut. Dengan demikian, pada kolaborasi pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya kepemimpinan fasilitatif dan transparansi proses telah terlaksana.

Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif adalah sebuah pendekatan yang mendasari kerja sama yang erat antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan di luar sektor publik dalam rangka mencapai tujuan bersama atau mengatasi masalah yang kompleks (Qomariyah, 2023). Proses kolaboratif terdiri dari beberapa langkah antara lain yaitu:

a. *Face to face dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama yang didasarkan pada interaksi antara individu atau kelompok dengan kepentingan yang terkait, dengan tujuan utama mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Untuk mencapai hal ini, dialog langsung di antara para pemangku kepentingan menjadi landasan penting (Ansell dan Gash dalam Qomariyah, 2023). Pada tahap awal dilibatkan komunikasi langsung antara pemangku kepentingan yang terlibat, yang berperan sebagai langkah menuju kesepakatan bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa dialog tatap muka berperan sebagai saluran komunikasi penting dalam membantu pemangku kepentingan mengidentifikasi peluang, tantangan, kelemahan, dan keuntungan bersama yang ingin dicapai. Dalam kolaborasi pelaksanaan program

padat karya di kecamatan semampir kota Surabaya dialog tatap muka berupa rapat koordinasi dan rapat evaluasi yang dilakukan oleh Bappedalitbang dengan kecamatan serta OPD pengampu terkait jenis padat karya.



Sumber : Bappedalitbang, Tahun 2024

Gambar 2 Rapat Koordinasi oleh Bappedalitbang

b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Proses kolaborasi memerlukan peran kunci dari pemangku kebijakan atau pemimpin kolaborasi untuk mengembangkan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Pemerintah Kota Surabaya sebagai aktor dalam kolaborasi melakukan berbagai hal dalam usaha membangun kepercayaan dalam upaya mencapai tujuan bersama. Membangun kepercayaan dalam kolaborasi pelaksanaan program padat karya di kecamatan semampir kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya memberikan kesempatan kepada aktor diluar kelembagaan pemerintah dalam menyampaikan pendapat. Pemerintah kota Surabaya juga melibatkan stakeholder sejak awal program tersebut dirancang.

c. *Commitment to Process* (Komitmen terhadap Proses)

Komitmen dari para stakeholder dalam melakukan kolaborasi menjadi salah satu faktor penting keberhasilan proses kolaborasi. Dalam kolaborasi pelaksanaan program padat karya di kecamatan semampir kota Surabaya upaya bappedalitbang dalam membangun komitmen yaitu dengan menanamkan motivasi gotong royong kepada stakeholder bahwa dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan kota Surabaya utamanya kemiskinan tidak hanya membutuhkan peran pemerintah saja akan tetapi, juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak diluar kelembagaan pemerintah.

d. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Mamad & Chahdi, 2013 dalam (Qomariyah, 2023) mengatakan bahwa ketergantungan memiliki dua komponen, yaitu esensi dari hubungan dan kesulitan untuk mengganti mitra kolaborasi. *Dependency* yang bersifat mutual akan menjadi *interdependency* (saling ketergantungan) dan berperan penting menghubungkan stakeholder dalam mengembangkan hubungan kolaboratif. Pada beberapa tahap dalam proses kolaboratif, pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama apa yang dapat mereka capai bersama. Upaya untuk berbagi pemahaman bersama antar *stakeholder* dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* tersebut ke dalam program sejak awal dan hal tersebut sudah terlaksana. Kesadaran saling ketergantungan terbangun karena memiliki satu misi yaitu pengentasan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan melalui program padat karya yang melibatkan warga miskin.

e. *Intermediate Outcome* (Hasil Menengah)

Roussos dan Fawcett 2000; Warner 2006 ; Weech-Maldonado dan Merrill 2000 dalam (Islamy, 2018) mengatakan bahwa literatur menunjukkan bahwa kolaborasi akan terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi sifatnya kongkrit dan ketika kemungkinan adanya “Small Wins” dari kolaborasi tersebut. *Small Wins* merupakan cita-cita jangka pendek yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program padat karya. Cita-cita ini akan berdampak bagi kehidupan masyarakat pada umumnya bukan sekedar selesai kegiatan maka berakhir pula dampaknya bagi Masyarakat yang terpenting adalah bukan kesuksesan yang diraih pada saat selesainya suatu program tetapi bagaimana kehidupan masyarakat selanjutnya ketika program ini telah berakhir atau apakah program ini bisa berkelanjutan. Dalam kolaborasi pelaksanaan program padat karya di kecamatan semampir kota Surabaya, *small wins* kurang tergambar menurut Bappedalitbang. Hal tersebut dapat dilihat bahwa jumlah warga miskin di kecamatan semampir masih cukup tinggi dibandingkan kecamatan lain dan belum adanya pergeseran status warga yang awalnya miskin menjadi non-miskin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dalam pelaksanaan program padat karya di kecamatan semampir kota Surabaya sudah terlaksana sesuai dengan teori menurut Ansell dan Gash (2008) yang mencakup 4 (empat) variabel yakni: (1) Kondisi Awal; (2) Desain Kelembagaan; (3) Kepemimpinan Fasilitatif; dan (4) Proses Kolaboratif. Proses kolaborasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Semampir sudah berjalan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa dimensi yang ada dalam proses kolaborasi sudah terpenuhi. Namun, kolaborasi tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan program padat karya sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya. Merujuk pada ke empat variabel tersebut sudah hampir terpenuhi semua namun pada variabel kondisi awal dan proses kolaboratif masih menjadi tantangan. Hal tersebut dapat dilihat pada kondisi awal masih terdapat kendala yaitu kurangnya waktu yang dimiliki pegawai kecamatan untuk melakukan survei kepada warga miskin penerima padat karya. Kemudian pada proses kolaboratif, komitmen pada proses juga masih menjadi tantangan karena masih ada warga miskin yang menolak dan tidak bersedia menjadi penerima manfaat padat karya.

Berdasarkan Kesimpulan diatas, penulis memberikan saran bahwa Organisasi Perangkat Daerah pengampu padat karya serta Pemerintah Kecamatan Semampir yaitu memperkuat mekanisme koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. meningkatkan forum koordinasi dan komunikasi lintas sektor yang melibatkan dinas, kecamatan, kelurahan, pihak swasta, serta masyarakat miskin agar perencanaan program padat karya lebih terarah serta melakukan pembaruan data wilayah sasaran, data pengangguran, dan kondisi infrastruktur untuk memastikan program padat karya tepat sasaran dan relevan juga melibatkan perwakilan kelompok masyarakat seperti RT dan RW dalam musyawarah perencanaan kegiatan padat karya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Badan Pusat Statistik. (2025, January 15). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved February 15, 2025, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>
- CNN INDONESIA. (2022, September 30). *RI Masuk 100 Negara Paling Miskin di Dunia*. Retrieved November 22, 2024, from [cnnindonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220930123851-532-854651/ri-masuk-100-negara-paling-miskin-di-dunia#:~:text=Indonesia%20masuk%20dalam%20100%20negara%20paling%20miskin%20di%20dunia.,%243.870%20per%20kapita%20pada%202020](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220930123851-532-854651/ri-masuk-100-negara-paling-miskin-di-dunia#:~:text=Indonesia%20masuk%20dalam%20100%20negara%20paling%20miskin%20di%20dunia.,%243.870%20per%20kapita%20pada%202020).
- Dakhilullah, M. F. (2023). Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Sebelum dan Selama Pandemi. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 60-75.
- Good Stats. (2024, November 21). *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun di 2024*. Retrieved November 23, 2024, from [data.goodstats.id: https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun-di-2024-afdYg](https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun-di-2024-afdYg)
- Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 629-644.
- Irfan, Andi Audia Faiza Nazli. (2024, November 21). *Good Stats*. Retrieved Februari 2024, from <https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun-di-2024-afdYg>
- Islamy, L. S. (2018). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Konsep dan Aplikasi*. Sleman: DEEPUBLISH.
- Kompasiana.com. (2024, Oktober 23). *Potret Kemiskinan Pulau Jawa, di Balik Pusat Ekonomi Indonesia*. Retrieved November 24, 2024, from [Kompasiana: https://www.kompasiana.com/rzmlan/671917edc925c434eb0d3aa2/potret-kemiskinan-pulau-jawa-di-balik-pusat-ekonomi-indonesia](https://www.kompasiana.com/rzmlan/671917edc925c434eb0d3aa2/potret-kemiskinan-pulau-jawa-di-balik-pusat-ekonomi-indonesia)
- Lafina, A. R., N. S., Wardhono, H., & Widyawati. (2023). Implementasi Program Padat Karya dalam Perspektif Collaborative Governance di Kelurahan Manyar Sabrangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 158-172.
- Mulyadi, M. (2018). STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13-18.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: BILDUNG.
- Pandita, P. L., Deviyanti, K. E., Batara, B. S., Syafrudin, F. F., & Prathama, A. (2024). Implementasi Program Padat Karya dalam Menanggulangi Kemiskinan. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 1119 – 1130.
- Paramitha, I. N., Soeharto, Q. W., & Widyastuti, R. (2021). *PROGRAM PADAT KARYA TA 2021*. Retrieved 2024, from <https://perpustakaan.dpr.go.id/https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/93#>

- Qomariyah, D. (2023). *Collaborative Governance*. Malang: SELARAS MEDIA KREASINDO.
- Radar Surabaya. (2024, Desember 9). *radar surabaya.id*. Retrieved from <https://radarsurabaya.jawapos.com/>:
<https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/775401630/atasi-kemiskinan-dan-pengangguran-pemkot-optimalkan-program-padat-karya>
- Sari, Y. W., & Meirinawati. (2024). STRATEGI PROGRAM PADAT KARYA OLEH DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA. *Jurnal Publika*, 292-307.
- Sholihin, M. K. (2021). Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur. *GEMAH RIPA: Jurnal Bisnis*.
- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- surabaya.tribunnews. (2024, Januari 14). *Lewat Program Padat Karya, 36.194 Pekerja di Surabaya Lepas dari Pengangguran*. Retrieved from <https://surabaya.tribunnews.com/>:
<https://surabaya.tribunnews.com/2024/01/14/lewat-program-padat-karya-36194-pekerja-di-surabaya-lepas-dari-pengangguran>